

## **IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH PEDALAMAN DI KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**Tiopilus Hanye<sup>1</sup>, Adam Idris<sup>2</sup>, Aji Ratna Kusuma<sup>3</sup>**

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to describe and analyze. Implementation of Infrastructure development in a Rural Development Acceleration. Research focus is: Road infrastructure construction, infrastructure construction bridge, construction of health infrastructure, education infrastructure development, economic infrastructure development, and construction of infrastructure worship source data extracted from key informants and informant.*

*As the informant is an employee of the District Government, village officials and community leaders. Meanwhile, as a key informant is Subdistrict Long Panghai . Analysis of the data used is a model developed Flow Miles and Huberman through the stages .*

*The object of the research findings indicate that the government's infrastructure development subdistrict Mahakam Ulu Long Pahangai be implementable District has undergone changes and improvements to the state of infrastructure in the area, however the change / improvement is less memprcepat hinterland development. From the District government action taken Mahakam Ulu Regency Long Panhangai through several activities such as the construction of road infrastructure, health infrastructure, education infrastructure, economic infrastructure, and the infrastructure of worship, shows indication of success, despite the successes achieved thus suboptimal or less appropriate qualifications expected. Judging from the value of the benefits, with the construction of facilities and infrastructure (infrastructure) in District Long Pahangai Mahakam Ulu regency, and the atmosphere can change the state of a better society, especially the construction of road infrastructure can accelerate accessibility, not only to perform the duties of governance and public services but also can facilitate all matters relating to the interests of people's lives. Government's infrastructure development subdistrict Long Pahangai Mahakam Ulu district, both in the field of*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

<sup>2</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

<sup>3</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

*health, education and the economy, a large contribution to people's lives, not only to improve public health, improve the quality of education, but also easy access to basic needs / konsumtif society. Less than optimal development of infrastructure in the District Long Pahangai Mahakam Ulu district due to limited budget allocation for each activity, the low transport accessibility necessitating greater cost, and funding factors are often delayed so that the applicative substandard infrastructure development and lead to less effective the results achieved.*

**Keywords:** *Infrastructure development*

### **Abtrak**

*Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis. Implementasi pembangunan Infrastruktur Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman. Fokus penelitian yang ditetapkan.meliputi : Pembangunan prasarana Jalan, Pembangunan prasarana Jembatan, Pembangunan prasarana kesehatan, Pembangunan prasarana pendidikan, Pembangunan prasarana ekonomi, dan Pembangunan prasarana peribadatan.*

*Sumber data diambil dari informan dan key informan. Sebagai informan adalah pegawai Pemerintahan Kecamatan, aparat desa dan pemuka masyarakat. Sedangkan sebagai key informan adalah Camat Long Panghai. Analisis data yang digunakan adalah model Alir yang dikembangkan Miles dan Huberman melalui tahapan-tahapan.*

*Dari hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu secara implementatif telah mengalami perubahan dan perbaikan terhadap keadaan infrastruktur di daerah tersebut, meski demikian perubahan/perbaikan tersebut kurang mempercepat pembangunan daerah pedalaman. Dari tindakan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu melalui beberapa kegiatan seperti pembangunan prasarana Jalan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, prasarana ekonomi, dan prasarana peribadatan, menunjukkan indikasi keberhasilan, meski demikian keberhasilan yang dicapai kurang optimal atau kurang sesuai kualifikasi yang diharapkan. Ditinjau dari nilai manfaat, dengan dibangunnya sarana dan prasarana (infrastruktur) di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, dapat merubah keadaan dan suasana lingkungan masyarakat lebih baik, terutama pembangunan prasarana jalan dapat mempercepat aksesibilitas, bukan hanya terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum tetapi juga dapat memperlancar segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, baik dibidang prasarana jalan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi, mempunyai arti penting untuk kehidupan masyarakat. Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan, rendahnya aksesibilitas transportasi sehingga diperlukan biaya yang lebih besar, dan faktor pendanaan yang sering terlambat sehingga secara*

**Kata Kunci :** *Pembangunan Infrastruktur*

### **Pendahuluan**

Dengan berlakunya UU No. 32 dan 34 tahun 2004 diharapkan akselerasi pembangunan di daerah dapat ditingkatkan. Karena daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi dalam perkembangannya justru tidak semua daerah di era otonomi, mampu mempercepat hasil pembangunan bahkan masih adanya daerah Kabupaten yang belum dapat menik-mati hasil pembangunan terutama pembangunan dibidang infrastruktur. Seperti yang terjadi di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu.

Dari hasil pengamatan diobjek penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah tersebut masih sangat terbatas bahkan jauh dari harapan masyarakat. Keadaan demikian justru dapat menghambat kemajuan masyarakat untuk meningkatkan daya saing dengan masyarakat lain.

Berbicara tentang pembangunan infrastruktur , mempunyai peranan penting, bukan hanya untuk membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas bidang ekonomi , sosial budaya tetapi untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum. Karena pembangunan infrastruktur belum dilakukan secara optimal, maka upaya peningkatan kehidupan masyarakat di daerah tersebut belum dapat terpenuhi.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, guna memperoleh informasi yang jelas, actual dan factual mengenai fenomena yang terjadi dengan pembangunan infrastruktur di objek penelitian. Melalui penelitian ini dapat mengungkap permasalahan secara menyeluruh mengenai pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Pahangai dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu.

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijaksanaan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Menurut Grindle (dalam Abdul Wahab, 1997 : 125) bahwa "*implementation as process politic and administration*" (Implementasi sebagai proses politik dan administrasi).

Pandangan Grindle ini setidaknya-tidaknya tidak jauh berbeda atau memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam melihat implementasi dalam keterkaitannya dengan lingkungan (*enviroment*). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses implementasi publik, yaitu : Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

negara. Perincian tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas : (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, (6) sumber daya yang dilibatkan.

Implementasi menurut Edward (1980 : 1) merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan. Secara sederhana tujuan implementasi kebijaksanaan adalah untuk menetapkan agar tujuan-tujuan kebijaksanaan pemerintah dapat direalisasikan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1985 : 447), bahwa Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau kelompok, yang dimaksudkan mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Hal ini termasuk upaya mentransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan.

Menurut Frederick (dalam Islamy, 2001 : 17), bahwa kebijakan "... *A proposed course of action of person, groups, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realized and objective or a purpose.*" ("...Serangkaian tindakan-tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usaha kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.")

Memahami implementasi kebijakan berarti usaha untuk mengetahui apa yang senyatanya terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa (Sabatier dan Mazmanian, 1988 : 4).

Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2005 : 342), implementasi dipandang sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasil kegiatan pemerintah. Karena itu, implementasi kebijakan membutuhkan adanya sistem pelaksanaan kebijaksanaan dimana perangkat khusus, didesain dengan maksud untuk mencapai tujuan akhir, atau dengan kata lain implementasi dipandang sebagai proses politik dan administrasi.

### **Teori Pembangunan**

Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nations building*). Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nations building*). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan

suatu perencanaan yang matang dan dilakukan secara sadar menuju suatu perubahan yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan suatu indikasi bahwa perencanaan dan kesadaran pelaksana pembangunan sangat menentukan.

Menurut perkembangan ilmu pengetahuan, tentang konsep pembangunan ternyata telah mengalami perkembangan yang berarti didalam memecahkan masalah. Dalam konsep pembangunan sebuah negara dapat mengacu pada suatu paradigma yaitu paradigma yang berorientasi pada pertumbuhan (*Growth*), dan kesejahteraan (*Welfare state*). Tetapi ada pula paradigma yang berorientasi pada neo ekonomi dan humanizing. Masing-masing paradigma tersebut memiliki perbedaan dan hal tersebut tergantung pada titik berat atau orientasinya.

Berdasarkan perkembangan paradigma pembangunan, terdapat dua premis yaitu kegagalan dan harapan terhadap model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang ditawarkan oleh beberapa pakar ekonomi. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada model pertumbuhan yang lebih mengarah pada *trickle down effect*. Yaitu efek menetes ke bawah (dalam Suprpto, 2000 : 77).

Paradigma ini memandang bahwa kekuatan ekonomi telah banyak memperdaya kekuatan masyarakat miskin. Hal tersebut disebabkan ukuran *Gross National Product* (GNP) yang lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kaya yang telah menyuplai angka pendapatan kepada masyarakat miskin. Adapun masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi tidak memberikan pendapatan riil tersebut kepada masyarakat miskin. Tetapi mereka hanya menyuplai angka sehingga efek nilai dan GNP yang tinggi tidak menetes pada masyarakat yang miskin. Meskipun GNP tinggi masyarakat tetap tidak berdaya dan mereka tetap miskin. Hal itu terlihat dari bahasan tentang modernisasi (Wilard A. Beiling, 1980) dalam Riyadi Suprpto yang mengetengahkan model modernisasi dari Rostow (1960) yang dikenal dengan *the stage theory atau linier theory*. Teori ini membahas lima tahapan pembangunan meliputi: "*Traditional society, preconditions for growth, the take off the drive to maturity and the age of high mass-consumtion*".

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas. (Riyadi dan Bratakusumah, 2004 : 41).

### **Pembangunan Infrastruktur**

Dalam rangka mempercepat pembangunan di suatu daerah harus didukung dengan berbagai faktor, diantaranya pembangunan infrastruktur. Tedaro, 2000 : 218) bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran

pengembangan dan perkembangan suatu daerah, karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terhambat, bahkan hasilnya kurang optimal.

Dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum sangatlah penting dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan disuatu daerah yang aksesibilitasnya rendah. Pentingnya pembangunan infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan terhadap infrastruktur tersebut. Terutama dapat dilihat dari aksesibilitas yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya.

Dalam Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 2001 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, disebutkan dalam Pasal 2, bahwa pembangunan infrastruktur mencakup :

1. Prasarana dan sarana perhubungan : jalan, jembatan, jalan kereta api, dermaga, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyeberangan sungai dan danau;
2. Prasarana dan sarana pengairan: bendungan, jaringan pengairan, bangunan pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan bangunan pembangkit listrik tenaga air;
3. Prasarana dan sarana permukiman, industri dan perdagangan: bangunan gedung, kawasan industri dan perdagangan, kawasan perumahan skala besar, reklamasi lahan, jaringan dan instalasi air bersih, jaringan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan sistem drainase;
4. Bangunan dan jaringan utilitas umum: gas, listrik, dan telekomunikasi.

Berdasarkan uraian di atas memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi, baik pada skala regional maupun nasional. Pembangunan infrastruktur fisik merupakan determinan penting dalam pembangunan masyarakat dan wilayah suatu daerah, karena mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memperlancar dan mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat tersebut. Terutama pembangunan jalan dan jembatan merupakan pembangunan infrastruktur yang penting dalam mempercepat laju pertumbuhan.

Menyikapi tentang pembangunan infrastruktur terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain

1. Membuka keterisolasian wilayah;
  2. Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran roda ekonomi wilayah;
  3. Mempermudah akses penggunaan teknologi dan pemanfaatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan dll.; serta
  4. Peningkatan mobilitas dan kontak sosial antar penduduk di berbagai daerah.
- (Tjokroamidjojo, 1995 : 162)

Mencermati pendapat diatas, pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting , tidak hanya bermanfaat untuk kelancaran perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat mempermudah aksesibilitas diberbagai sektor dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Dari pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan

wilayah. Seperti pengembangan infrastruktur Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah pedalaman, dalam rangka akselerasi pembangunan maka pembangunan infrastruktur perlu diprioritaskan tidak hanya menyangkut kepentingan kegiatan sosial, transportasi, ekonomi, tetapi juga politik dan keamanan.

Dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan daerah pedalaman maka pembangunan infrastruktur mempunyai nilai strategis, karena ini perlunya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah disegala bidang kehidupan masyarakat.
2. Untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah;
3. Untuk pemerataan dan keadilan pembangunan disegala bidang;
4. Untuk meningkatnya peran serta masyarakat;
5. Untuk meningkatnya peranan sistem transportasi nasional dalam memenuhi kebutuhan mobilitas manusia, barang dan jasa;
6. Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai yang dibutuhkan. (Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu, 2014).

### **Pembangunan Daerah Pedalaman**

Pembangunan daerah pedalaman dimaksud suatu usaha secara terencana dan tersusun secara sistematis yang dilakukan suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan suatu daerah yang baru dimekarkan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, maka pembangunan merupakan determinan penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dengan dilakukan pembangunan maka daerah akan mengalami perubahan dan memberikan nilai manfaat yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan percepatan pembangunan di Kecamatan Long Pahangai maka pembangunan yang dilakukan, lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur.

### **Analisis Data**

Sesuai tujuan penelitian yang ditetapkan maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model alir yang dikembangkan oleh Miles & Huberman melalui tahapan-tahapan, yaitu mulai dari pengumpul-an data, penyajian data, kesimpulan/Verifikasi data

### **Hasil Penelitian**

Pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk mempercepat pembangunan daerah, karena itu sudaah selayaknya mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Disamping itu kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat sangat besar untuk meningkatkan aksesibilitas kehidupan masyarakat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Infrastruktur di kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu meskipun telah mengalami perubahan terhadap berbagai sarana dan prasarana di daerah tersebut tetapi

perubahan yang terjadi kurang mempercepat pembangunan daerah pedalaman. Meski demikian pembangunan yang dilakukan pemerintah kecamatan, telah memberikan kontribusi yang berarti kehidupan masyarakat terutama dari aksesibilitas kepentingan masyarakat lebih lancar dan demikian pula penyelenggaraan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efektif.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu meskipun hasil yang dicapai kurang optimal, tetapi dari tindakan yang dilakukan termasuk cukup berhasil. Dalam hal pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Pahangai ada 4 (empat) aspek yang menjadi skala prioritas perlu diselesaikan lebih lanjut yaitu pembangunan prasarana jalan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan dan prasarana ekonomi. Dari empat aspek tersebut memang sudah menjadi agenda pemerintah kecamatan yang telah dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Mahakam Ulu. Untuk mengetahui secara substansial mengenai pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, dapat dijelaskan pada bahasan dibawah ini :

#### **Pembangunan prasarana jalan**

Pembangunan prasarana jalan merupakan determinan penting untuk menunjang aksesibilitas kehidupan masyarakat dalam segala hal. Karena itu pembangunan prasarana jalan, memang selayaknya direali-sasikan, mengingat rendahnya aksesibilitas, di daerah tersebut sehingga kepentingan masyarakat kurang dapat terpenuhi secara cepat. Dari hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa pembangunan prasarana jalan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Long Pahangai telah mengalami perubahan dan perbaikan beberapa ruas jalan. Hal tersebut dapat diketahui dari data menunjukkan adanya peningkatan kualitas jalan, yaitu untuk jalan berkerikil ada penambahan 5 km dan jalan tanah ada penambahan 10 km. Dengan demikian panjang jalan kerikil di Kecamatan Long Pahangai hingga akhir Bulan Juli 2014 mencapai 15 km, sedangkan jalan tanah mencapai 45 km. dememakan biaya sebesar Rp 11.500.800.674,- yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja dngan aerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Dengan pertambahan pembangunan prasarana jalan dan tersebut artinya aksesibilitas transportasi di wilayah tersebut cukup lancar dan kehidupan masyarakat lebih baik. Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur bidang jalan di Kecamatan Long Pahangai disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran yang disetujui pihak pimpinan organisasi vertikal, sehingga hanya daerah kampung tertentu yang mendapat prioritas, sedangkan daerah kampung lain yang belum mendapat kesempatan akan diajukan pada tahun anggaran berikutnya.

#### **Pembangunan Prasarana Kesehatan**

Pembangunan prasarana kesehatan mempunyai posisi penting untuk mendukung terselenggaranya pemerintah yang efektif, sebab dengan prasarana

kesehatan yang memadai niscaya kesehatan para penyeleng-garan negara/pemerintah dan masyarakat akan lebih terjamin.. Sehubungan hal tersebut maka perlu mendapat perhatian pemerintah kabupaten agar tercapainya derajat kesehatan masyarakat lebih baik. maka perlu diupayakan kemudahanan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan cepat, bermutu dan murah. Bahkan saat ini dengan adanya program Jamkesmas, seluruh masyarakat diberi jaminan untuk mendapatkan kesehatan di pusat pelayanan masyarakat seperti di Puskesmas, Rumah Sakit Umum, atau Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk. Sehubungan dengan program peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka pemerintah telah membangun beberapa gedung, baik untuk puskesmas pembantu maupun posyandu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur bidang kesehatan di Kecamatan Long Pahangai, telah mengalami penambahan fasilitas bangunan untuk Puskesmas Pembantu dan bebeapa posyandu yang tersebar di beberapa kampung.

Pembangunan infrastruktur bidang kesehatan di Kecamatan Long Pahangai merupakan proyek dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu yang berasal dari usulan masyarakat.. Sehubungan pembangunan tersebut dikoordinasikan dengan berbagai pihak yaitu antara Dinas Kesehatan Kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pihak ketiga (pemborong) dan warga masyarakat. Adanya koordinasi yang baik ini diakui dapat menyatukan, menyelaraskan arah kegiatan pembangunan di Kecamatan Long Pahangai. Sedangkan dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa tidak semua usulan pembangunan bidang kesehatan dapat terealisasi. Penyeleksian program dan usulan sesuai dengan skala prioritas serta keterbatasan dana diakui menjadi salah satu sebab implementasi pembangunan infrastruktur bidang kesehatan di Kecamatan Long Pahangai tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Dari hasil temuan diobjek penelitian menunjukan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Long Pahangai mampu menambah fasilitas kesehatan, seperti gedung Puakesmas pembantu dan beberapa Posyandu diberbagai wilayah kecamatan Long Pahangai.

### **Pembangunan prasarana pendidikan,**

Pembangunan infrastruktur bidang pendidikan di Kecamatan Long Pahangai diimplementasikan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu . RKPD ini berasal dari usulan dari masing-masing Kecamatan (Pemerintah Kecamatan dan Kepala Sekolah) dan Dinas Pendidikan Kabupaten sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan telah sesuai dengan aspirasi dan tingkat kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pendidikan di kecamatan Long Pahangai merupakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pendidikan bertujuan mengupayakan agar pada peserta didik di wilayah Kecamatan Long Pahangai mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran yang bermutu, sehingga pembangunan infrastruktur pendidikan diarahkan untuk membangun dan melengkapi fasilitas pendidikan yang ada. Didukung juga dengan upaya penambahan tenaga guru, baik

yang berstatus PNS maupun Honorer karena tanpa dukungan tenaga pendidik, maka akan menghambat proses belajar mengajar.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur bidang pendidikan yang dilakukan di Kecamatan Long Pahangai dapat dikatakan hampir tidak ada. Keterlibatan yang ada hanya sebagai tenaga kerja saja. Namun demikian dalam kerangka pembangunan dari, untuk dan oleh rakyat, secara tidak langsung warga masyarakat ikut menjaga keberadaan fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Long Pahangai. Selain itu dari hasil penelitian menjelaskan adanya koordinasi yang baik diantara pemerintah Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Koordinasi ini dimulai dari tahap perencanaan, implementasi dan pengawasan proyek pembangunan. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak kontraktor pembangunan atau pengadaan perlengkapan sekolah.

Ditinjau dari sisi pendanaan bahwa pembangunan prasarana pendidikan berasal dari APBD dengan memakan biaya sebesar Rp. 1.500.000.,000,- Namun demikian dalam implementasinya bukan berarti pemerintah Kecamatan mendapatkan dana tersebut secara cash atau tunai. Menurut nara sumber di Kecamatan, bahwa dana tersebut tidak berupa uang saja namun berwujud pembangunan atau program lainnya baik yang datang dari pemerintah kabupaten ataupun yang dikelola pemerintah kecamatan dan jika dihitung tiap tahunnya mendekati jumlah tersebut. Sedangkan mengenai manfaat dari pembangunan infrastruktur pendidikan secara langsung dirasakan oleh pihak sekolah sendiri dan secara tidak langsung dirasakan oleh para siswa, dan orang tua sehubungan dengan program sekolah gratis..

### **Pembangunan Prasarana Ekonomi.**

Pembangunan infrastruktur ekonomi selalu mendapat penekanan dari pemerintah di samping infrastruktur lainnya. Oleh karena ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi ini erat kaitannya dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, meskipun jalan, jembatan, berhubungan sarana ekonomi masyarakat umum yang dimaksud adalah sarana dan prasarana pasar atau untuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur pasar di Long Pahangai dari hasil penelitian terdiri dari pembangunan pasar baru di kampung-kampung yang belum mempunyai pasar tradisional dan perluasan atau penambahan fasilitas pasar di Kecamatan Long Pahangai. Adapun realisasi dari kebijakan ini dilihat dari tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas pasar. Demikian juga dengan pembangunan gedung untuk Koperasi Unit Desa dalam melayani keperluan masyarakat terutama masyarakat yang membudidayakan ikan keramba di Long Pahangai.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infra-struktur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RKP Dinas Pasar Kabupaten Mahakam Ulu dalam percepatan pembangunan daerah pedalaman

Demikian juga dalam proses pembangunan pasar di dua kampung sebagaimana hasil penelitian, pelaksanaan pembangunan mengikuti sertakan lembaga aparat kampung, selain pemerintah pemerintahan kampung sebagai

koordinator, LPM Desa juga menggerakkan masyarakat desa. Kecuali pembangunan Gedung KUD di Kecamatan Long Pahangai yang dilaksanakan oleh kontraktor. Dari kedua hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur bidang ekonomi baik dalam perencanaan yang bersifat *bottom up* maupun dalam pelaksanaan dengan memberdayakan masyarakat. Contoh pembangunan seperti ini merupakan wujud dari pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat dan perlu dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

Pembangunan infrastruktur bidang ekonomi di Kecamatan Long Pahangai dibebankan kepada dana dari APBD Kabupaten di tiap tahun anggaran. Dengan demikian pelaksanaannya tidak semua dapat dilakukan secara serempak, namun secara bertahap karena keterbatasan dana pembangunan. Keseriusan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur ekonomi sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatpun meningkat.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan Pemerintahan Kecamatan Long Pahangai mampu menambah beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Misalnya perluasan pasar tradisional, dan kios-kios, ternyata dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk meningkatkan mobilitas ekonomi di daerah tersebut.

### **Pengawasan**

Kemudian dari aspek pengawasan terkait dengan pembangunan infrastruktur, ternyata telah dilakukan secara efektif oleh pihak terkait, baik dari aparat pemerintah kecamatan, maupun aparatur terkait dengan infrastruktur yang dibangun, Misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pasar.

Dari aspek koordinasi antar aparatur pelaksana terkait dengan pembangunan infrastruktur, fakta menunjukkan suatu indikasi mengenai koordinasi yang dibangun antar petugas sudah berjalan efektif. Hal tersebut tercermin oleh komunikasi dan interaksi yang dilakukan dalam melakukan pengawasan/pemantauan terhadap infrastruktur yang dibangun telah berjalan cukup efektif

### **Koordinasi**

Koordinasi penting dilakukan agar semua kegiatan pembangunan infrastruktur dapat dicapai secara efektif. Koordinasi adalah suatu kegiatan untuk menyatupadukan dari berbagai unit/instansi agar terdapat kesamaan tindak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Mengingat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Pahangai, melibatkan berbagai instansi terkait maka koordinasi harus dilakukan agar terdapat keselarasan dan kesamaan tindak antara pembangunan infra-struktur yang satu dengan yang lainnya dapat mencapai hasil yang efektif. Dalam hal koordinasi yang dilakukan petugas pelaksana terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu. Menunjukkan indikasi cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan para unsur pelaksana terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pasar telah dikoordinasikan dengan baik.

### **Faktor yang menghambat**

Faktor yang menghambat implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Pahangai antara lain :Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, tidak ada aparatur yang mempunyai keterampilan bidang infrastruktur, Rendahnya aksesibilitas transportasi ke lokasi sehingga diperlukan biaya yang lebih besar

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu secara implementatif berhasil dan membawa perubahan terhadap kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Secara empiric pembangunan imprastruktur yang dilakukan pemerintah Kecamatan Long Pahangai kurang mempr-cepat pembangunan daerah pedalaman. Terindikasi dari hasil yang dicapai, baik melalui prasarana jalan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan dan prasarana ekonomi, kesemuanya belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan masyarakat Long Pahanagai.
2. Ditinjau dari nilai manfaat, dengan dibangunnya sarana dan prasarana (infrastruktur) di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, dapat merubah keadaan dan suasana lingkungan masyarakat lebih baik, terutama pembangunan prasarana jalan dapat mempercepat aksesibilitas, bukan hanya terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum tetapi juga dapat memperlancar segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan masyarakat.
3. Kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Pahanagai Kabupaten Mahakam Ulu disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan, rendahnya aksesibilitas transportasi sehingga diperlukan biaya yang lebih besar, dan faktor pendanaan yang sering terlambat dan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur

### **Saran-saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas penulis akan mencoba memberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Mengingat terbatasnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur khususnya prasarana jalan, maka untuk mepercepat pembangunan prasarana jalan, pihak pemerintah kecamatan dapat mengusulkan penambahan anggaran melalui rencana APBD yang diajukan tiap tahunnya.
2. Mengingat belum ada keselarasan antara rencana kerja dengan pendanaan, maka diperlukan langkah-langkah kooperatif dengan berbagai pihak yang berkepentingan, melalui kerjasama dan koordinasi yang baik melalui sarana komunikasi yang lebih efektif.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah atau melakukan mitra kerja/kerja sama untuk akselerasi pembangunan.

### **Daftar Pustaka**

- Anderson, J.E. 1979. *Public Policy Making* Holt. Rinehart and Winston. New York.
- Bryant, Corralie dan White, Louise G. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3ES. Jakarta.
- Grindle, M. 1980. *Politics and Policy Implementations in the third World*. Princeton University Press
- Islamy, A. Irvan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Edisi 2 Cet. 1. Bina Aksara: Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat, Sebuah Tinjauan Administrasi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada FIA Unibraw. Malang.
- Lineberry, Robert H. 1978. *American Public Policy*. North Western University Harper And Row. Publiser, New York.
- Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*, Baverly Hills, Sage Publication inc
- Milles B, Mathew dan A.Michaell Huberman. 2005. Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang metode-metode Baru. Diterjemahkan oleh TR. Rohidi Jakarta: Penerbit Univesitas Indonesia. Jakarta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rondinelli, Dennis, A. 1981. *Government Decentralization In Comparative Perspective: Theory and Practice In Developing Countries*. In International Review of Administration Science. Vol. XL.VII Number 2.
- Sabatier. 1988. *Implementation: The Concepts of Optimal Conditions for Effectively Accomplishing Objectives, in Public Administration* (Ed Stillman H, R.J) George Mason University.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1995. Good Governance; Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume II No.1 FIA. UNBRAW. Malang.
- Van Meter, D.S. and C.E. Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process: Conceptual Framework*. USA. Administration and Society.